

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MANAJEMEN SARANA PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN

A. Landasan Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjadi pijakan dalam memahami dan menganalisis fenomena manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara mendalam. Teori-teori yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yakni pengelolaan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah aliyah negeri. Kerangka teoritis ini mencakup konsep-konsep dasar yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pemahaman yang utuh tentang dinamika manajemen infrastruktur pendidikan dalam konteks kelembagaan madrasah. Teori manajemen sarana prasarana pendidikan berkembang secara dinamis seiring dengan transformasi paradigmatik dalam dunia pendidikan, yang semakin menuntut pendekatan komprehensif dan integratif dalam pengelolaan sumber daya pendidikan (Mulyasa, 2013).

1. Teori Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengelolaan atau pengurusan. Kata ini juga memiliki akar dari bahasa Perancis kuno, yakni *management*, yang berarti seni dalam melaksanakan dan mengatur suatu

kegiatan Nila, (2022). Menurut Griffin (2004), manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, serta pemantauan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran dengan cara yang efisien dan efektif.

Ki Hajar Dewantara (1977) menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Manajemen sering kali dipahami sebagai suatu ilmu, namun penting untuk dicatat bahwa belajar manajemen tidak selalu menjamin seseorang akan menjadi manajer yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bukan hanya sekadar pengetahuan teoritis, tetapi juga melibatkan keterampilan praktis dan pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip manajerial. Berbagai definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konsep ini.

Menurut Hasibuan (2006), manajemen berkaitan erat dengan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan Keputusan. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat dihasilkan produk atau jasa secara efisien. Definisi ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi, serta menunjukkan bahwa manajemen adalah proses yang dinamis dan terintegrasi.

Sementara itu, Terry dan Laslie (Manullang, 1985). mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan sekelompok orang menuju tujuan organisasi. Definisi ini menyoroti aspek kolaboratif dalam manajemen, di mana manajer tidak hanya bertindak sebagai pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu timnya untuk mencapai tujuan bersama. Manula menambahkan dimensi lain dengan mendefinisikan manajemen dalam tiga arti: sebagai proses, sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan sebagai seni serta pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya melibatkan teknik dan prosedur, tetapi juga keterampilan interpersonal dan kreativitas.

Follett (2014) memberikan perspektif yang menarik dengan menyatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan

pekerjaan melalui orang-orang. Definisi ini menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam praktiknya, manajemen yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengatur dan memotivasi orang lain, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Terry dan Rue (2005) juga menekankan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi anggota tim.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen bukan hanya sekadar ilmu, tetapi juga seni yang memerlukan keterampilan interpersonal, pemahaman tentang dinamika kelompok, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Hal ini menjadikan manajemen sebagai bidang yang kompleks dan menarik untuk dipelajari serta diterapkan dalam berbagai konteks organisasi.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan sebuah organisasi yang efektif dan efisien. Para ahli manajemen telah mengemukakan berbagai perspektif mengenai fungsi-

fungsi esensial dalam manajemen yang berkembang seiring dengan kompleksitas organisasi modern. Dalam perkembangannya, beberapa ahli telah mengemukakan pandangan yang beragam namun saling melengkapi mengenai fungsi-fungsi manajemen ini.

Menurut Siagian, (dalam Hasibuan, 2011).fungsi manajemen terdiri dari lima elemen utama yang saling berkaitan, diantaranya:

- 1) Perencanaan (*Planning*) merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas organisasi dan menentukan arah strategis yang akan ditempuh.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah proses pengelompokan sistematis yang melibatkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Penggerakan (*Motivating*) didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan yang bertujuan agar mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses pengamatan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan

bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- 5) Penilaian (*Evaluation*) menjadi fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Dalam konteks pengorganisasian (*Organizing*), Terry dan Rue (2005) memperluas pemahaman dengan menjelaskan bahwa fungsi ini mencakup pengelompokan dan penentuan berbagai kegiatan penting serta pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur dan hierarki dalam organisasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.

- 1) *Planning* (Perencanaan) Terry dan Rue (2005) memandang perencanaan sebagai proses fundamental yang menentukan arah dan tujuan organisasi. Mereka menekankan pentingnya perencanaan strategis yang mencakup analisis lingkungan bisnis, penetapan sasaran jangka panjang, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pandangan mereka, perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi.
- 2) *Organizing* (pengorganisasian) Dalam perspektif Terry dan Rue (2005), pengorganisasian merupakan proses mendesain struktur formal untuk penggunaan sumber daya organisasi yang paling

efektif. Fungsi ini mencakup penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan-keputusan harus dibuat. Pengorganisasian yang baik menciptakan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.

- 3) *Staffing* (Pengisian Jabatan) Terry dan Rue (2005) memberikan perhatian khusus pada fungsi *staffing* sebagai proses yang fokus pada pengelolaan sumber daya manusia organisasi. Fungsi ini mencakup rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan evaluasi karyawan. Mereka menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, serta pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan organisasi.
- 4) *Motivating* (Pemotivasian) Fungsi *motivating* menurut Terry dan Rue (2005) berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan individu, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, dan pengembangan sistem insentif yang efektif. Motivasi yang tepat mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi organisasi.
- 5) *Controlling* (Pengendalian) Terry dan Rue (2005) memandang *controlling* sebagai proses memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Fungsi ini mencakup penetapan

standar kinerja, pengukuran hasil, evaluasi kinerja, dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Pengendalian yang efektif memungkinkan organisasi untuk tetap pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

Fungsi pergerakan (*Motivating*) mendapatkan perhatian khusus dari Massie (1985) yang melihatnya sebagai proses vital dalam mengarahkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan organisasi. Ia menekankan bahwa motivasi bukan sekadar pemberian perintah, melainkan proses kompleks yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi karyawan.

- a) Pengambilan Keputusan Massie (1985) menempatkan pengambilan keputusan sebagai fungsi sentral dalam manajemen. Menurutnya, proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, evaluasi alternatif, dan pemilihan tindakan terbaik. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan analisis yang cermat terhadap informasi yang tersedia dan pertimbangan terhadap berbagai konsekuensi yang mungkin timbul.
- b) Pengorganisasian Dalam pandangan Massie, fungsi pengorganisasian fokus pada penciptaan struktur dan sistem yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini mencakup penentuan pembagian kerja, departementalisasi, dan koordinasi antar unit kerja. Pengorganisasian yang efektif memungkinkan

aliran kerja yang lancar dan komunikasi yang efektif dalam organisasi.

- c) Pengisian Staf Massie memandang pengisian staf sebagai proses kritis dalam memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Fungsi ini meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian karyawan. Pengelolaan SDM yang efektif menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam jangka panjang.
- d) Perencanaan Fungsi perencanaan menurut Massie mencakup penetapan tujuan dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini melibatkan analisis situasi, forecasting, dan pengembangan rencana tindakan. Perencanaan yang baik memberikan arah yang jelas bagi seluruh aktivitas organisasi.
- e) Pengawasan Dalam konsep Massie, pengawasan merupakan proses memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan standar yang ditetapkan. Fungsi ini mencakup monitoring aktivitas, evaluasi hasil, dan implementasi tindakan korektif. Pengawasan yang efektif membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara dini.
- f) Komunikasi Massie memberikan penekanan khusus pada fungsi komunikasi sebagai proses vital dalam manajemen. Menurutnya, komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang baik antar

berbagai bagian organisasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

- g) Pengarahan Fungsi pengarahannya menurut Massie berkaitan dengan proses memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota organisasi. Proses ini mencakup kepemimpinan, motivasi, dan supervisi yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga pandangan ahli manajemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pengelompokan dan penekanan fungsi-fungsi manajemen, inti dari semua pendapat tersebut mengarah pada proses sistematis dalam pengelolaan organisasi. Siagian menekankan pada siklus manajemen yang komprehensif dengan penilaian sebagai fungsi penutup. Terry dan Rue (2005) memberikan perhatian khusus pada aspek pengelolaan sumber daya manusia melalui fungsi staffing dan motivating. Sementara Massie memperluas cakupan fungsi manajemen dengan memasukkan aspek komunikasi dan pengambilan keputusan sebagai fungsi yang mandiri. Keragaman pandangan ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas manajemen modern dan memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk mengadaptasi fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan kebutuhan dan konteks spesifik mereka.

c. Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip manajemen merupakan pedoman fundamental yang menjadi dasar dalam praktik pengelolaan organisasi. Menurut Hasibuan (2009), prinsip manajemen bukanlah hukum yang bersifat kaku, melainkan pedoman yang perlu diterapkan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Prinsip-prinsip ini muncul dari hasil penelitian dan pengalaman praktis para ahli manajemen yang telah teruji dalam berbagai konteks organisasi. Dalam penerapannya, seorang manajer harus memahami bahwa prinsip manajemen bersifat universal namun cara penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi (Usman, 2015).

Pembagian kerja (*Division of Work*) menjadi prinsip pertama yang sangat krusial dalam manajemen. Robbins dan Coulter (2018) menegaskan bahwa pembagian kerja yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengatasi keterbatasan manusia dalam hal waktu, pengetahuan, kemampuan, dan perhatian. Spesialisasi yang terbentuk dari pembagian kerja yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Tanpa adanya pembagian kerja yang jelas, organisasi akan mengalami tumpang tindih tanggung jawab yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Prinsip wewenang dan tanggung jawab (*Authority and Responsibility*) memiliki peran vital dalam struktur organisasi. Griffin (2016) menjelaskan bahwa harus ada keseimbangan antara wewenang

yang diberikan dengan tanggung jawab yang diemban. Ketika seorang manajer diberikan wewenang untuk mengambil keputusan, ia juga harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Hal ini menciptakan rantai komando yang jelas dan memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan.

1) Pembagian Kerja (*Division of Work*)

Pembagian kerja merupakan fondasi utama dalam manajemen modern yang memungkinkan organisasi mencapai efisiensi optimal. Robbins dan Coulter (2018) menekankan bahwa prinsip ini muncul dari pemahaman mendalam tentang keterbatasan manusia dalam melakukan berbagai tugas secara simultan. Dalam implementasinya, pembagian kerja tidak hanya tentang mendistribusikan tugas, tetapi juga mencakup analisis mendalam tentang kompetensi dan kapabilitas setiap individu dalam organisasi.

Keefektifan pembagian kerja dapat dilihat dari bagaimana organisasi mampu mengoptimalkan sumber daya manusianya. Jones dan George (2019) menjelaskan bahwa organisasi yang berhasil menerapkan prinsip ini akan mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan melalui spesialisasi yang tepat. Spesialisasi ini memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keahlian spesifik yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas *output* organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks modern, pembagian kerja juga harus mempertimbangkan aspek fleksibilitas dan adaptabilitas. Daft (2021) menguraikan bahwa organisasi perlu menyeimbangkan antara spesialisasi yang terlalu *rigid* dengan kebutuhan akan kemampuan *cross-functional*. Hal ini penting mengingat dinamika bisnis yang semakin kompleks dan cepat berubah, di mana karyawan mungkin perlu memiliki *multiple skills* sambil tetap mempertahankan spesialisasi utama mereka.

2) Wewenang dan Tanggung Jawab (*Authority and Responsibility*)

Prinsip wewenang dan tanggung jawab merupakan elemen krusial dalam menciptakan struktur organisasi yang efektif. Griffin (2016) menjelaskan bahwa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab menjadi kunci dalam membangun sistem manajemen yang akuntabel. Wewenang yang diberikan harus sejalan dengan kapasitas individu untuk memikul tanggung jawab, sementara tanggung jawab yang diemban harus didukung oleh wewenang yang memadai.

Dalam praktiknya, prinsip ini memerlukan sistem yang jelas dalam pendelegasian wewenang. Schermerhorn (2020) menguraikan bahwa organisasi perlu membangun mekanisme yang memungkinkan terjadinya transfer wewenang yang efektif tanpa mengurangi akuntabilitas. Hal ini mencakup pembuatan standar

operasional prosedur, sistem pelaporan, dan mekanisme kontrol yang memadai.

Lebih jauh lagi, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi modern tidak lagi bersifat hierarkis yang kaku. Jones dan George (2019) menekankan pentingnya membangun sistem yang memungkinkan terjadinya pembagian tanggung jawab yang lebih dinamis, terutama dalam konteks tim lintas fungsi atau proyek-proyek khusus.

3) Kesatuan Arah dan Tujuan (*Unity of Direction*)

Kesatuan arah menjadi prinsip vital yang memastikan seluruh elemen organisasi bergerak dalam harmoni menuju tujuan yang sama. Daft (2021) mengelaborasi bahwa prinsip ini tidak hanya tentang menentukan arah, tetapi juga tentang membangun pemahaman bersama tentang tujuan organisasi pada semua level.

Implementasi prinsip ini memerlukan sistem komunikasi yang efektif dan komprehensif. Robbins dan Coulter (2018) memaparkan bahwa organisasi perlu membangun mekanisme yang memungkinkan terjadinya aliran informasi yang lancar dari level strategis hingga operasional. Hal ini mencakup pembentukan sistem yang memungkinkan terjadinya umpan balik dua arah antara manajemen dan karyawan.

Dalam era digital, kesatuan arah juga berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan

fokus pada tujuan utama. Griffin (2016) menekankan pentingnya membangun sistem yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan tanpa kehilangan arah strategis organisasi.

2. Manajemen Sarana dan Prasarana

a. Definisi Sarana dan Prasarana

Dalam konteks pendidikan, konsep sarana dan prasarana memiliki peran fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Secara terminologis, sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen instrumental yang menjadi fondasi operasional dari sistem pendidikan itu sendiri (Kompri, 2014: 192). Kompleksitas definisi sarana dan prasarana menuntut pemahaman yang mendalam tentang kontribusi masing-masing komponen dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan konstruktif.

Sarana pendidikan, menurut berbagai ahli pendidikan, dapat didefinisikan sebagai perangkat atau fasilitas yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar (Arikunto, 1993: 81). Definisi ini mengandung pengertian bahwa sarana merupakan instrumen vital yang memberikan dukungan konkret terhadap aktivitas pendidikan. Kompri dalam kajiannya menegaskan bahwa sarana adalah “Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan” (Kompri, 2014: 193). Pandangan ini menekankan bahwa sarana tidak sekadar pelengkap, melainkan

komponen esensial yang memfasilitasi terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan.

Lebih lanjut, Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperluas cakupan definisi sarana sebagai “semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak” (Daryanto, 2001: 51). Karakteristik ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan memiliki spektrum yang luas, mencakup berbagai jenis peralatan dan infrastruktur yang mendukung proses pendidikan. Contoh konkret dari sarana pendidikan meliputi buku-buku perpustakaan, peralatan laboratorium, media pembelajaran, dan berbagai instrumen edukatif lainnya.

Prasarana pendidikan, di sisi lain, memiliki definisi yang sedikit berbeda namun sama pentingnya. Prasarana didefinisikan sebagai fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan (Minarti, 2011: 252). Minarti menjelaskan bahwa prasarana seperti halaman, kebun, taman sekolah pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Menariknya, beberapa prasarana dapat bertransformasi menjadi sarana pendidikan ketika dimanfaatkan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya taman sekolah yang digunakan untuk pengajaran biologi atau halaman sekolah yang difungsikan sebagai lapangan olahraga.

Perspektif komprehensif tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dikemukakan oleh Sulistyorini, yang mendefinisikannya sebagai “suatu proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien” Sulistyorini, (2009: 115). Definisi ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, hingga penghapusan sarana dan prasarana.

Hamiyah, (2015: 124). lebih lanjut memperluas pemahaman dengan mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai “semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri”. Pandangan ini menekankan bahwa sarana dan prasarana tidak sekadar infrastruktur fisik, melainkan sistem pendukung yang integral dalam mencapai tujuan pendidikan.

b. Pentingnya Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana memiliki peran fundamental dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang optimal. Menurut Barnawi dan Arifin (2012), sarana dan prasarana pendidikan tidak sekadar menjadi pelengkap kegiatan pembelajaran, melainkan merupakan komponen strategis yang memengaruhi keberhasilan proses pendidikan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana mencakup berbagai fasilitas fisik, seperti gedung sekolah, ruang kelas,

laboratorium, perpustakaan, serta alat dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Adapun beberapa alasan mendasar pentingnya manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mendukung Kualitas Proses Pembelajaran Sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa standar sarana dan prasarana bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran agar berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Direktorat Pembinaan SMA, 2010).
- 2) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan Manajemen sarana dan prasarana yang sistematis dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan. Sutjipto (2011) mengemukakan bahwa pengelolaan yang baik memungkinkan institusi pendidikan untuk memanfaatkan setiap fasilitas secara maksimal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas kegiatan akademik.
- 3) Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik akan menjamin keselamatan dan kenyamanan

seluruh warga sekolah. Hal ini mencakup aspek fisik bangunan, peralatan laboratorium, ruang kelas, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pengelolaan yang komprehensif akan meminimalisir risiko kecelakaan dan menciptakan suasana belajar yang aman (Rusydi, 2018).

- 4) Mendukung Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Fasilitas yang memadai dan dikelola dengan baik akan mendorong munculnya inovasi pendidikan. Guru dan peserta didik dapat mengeksplorasi metode pembelajaran baru, mengembangkan kreativitas, dan memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2013).
- 5) Mencerminkan Mutu Lembaga Pendidikan Kualitas sarana dan prasarana sering kali menjadi indikator mutu suatu lembaga pendidikan. Institusi yang memiliki manajemen sarana dan prasarana yang baik akan lebih diminati oleh calon peserta didik dan dianggap lebih profesional (Rohiat, 2010).

c. Komponen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan unsur fundamental yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan berkualitas. Dalam konteks pendidikan, sarana dan prasarana mencakup berbagai elemen yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Menurut Barnawi dan Arifin (2012), komponen sarana dan prasarana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori

yang saling terkait dan mendukung. Kategori ini meliputi fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga, serta alat dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Setiap kategori memiliki fungsi dan peran yang spesifik, namun semuanya saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik bagi siswa.

Lebih lanjut, pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup aspek pemeliharaan, pengembangan, dan inovasi. Misalnya, ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi modern seperti proyektor dan perangkat lunak pembelajaran interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi metode pengajaran yang lebih variatif. Selain itu, perpustakaan yang kaya akan sumber belajar dan akses terhadap teknologi informasi akan memperluas wawasan siswa dan mendukung pembelajaran mandiri. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua elemen pendidikan berfungsi secara sinergis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Adapun komponen-komponen sarana dan prasarana pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, terdapat beberapa prasarana utama yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan. Salah satu komponen fundamental adalah lahan atau area sekolah. Lahan ini mencakup wilayah keseluruhan institusi pendidikan yang digunakan untuk berbagai aktivitas akademik dan non-akademik. Kriteria lahan meliputi lokasi yang strategis, aman, memenuhi persyaratan kesehatan, dan memiliki akses yang memadai. Menurut Mulyasa (2013), luas lahan harus proporsional dengan jumlah peserta didik dan rencana pengembangan institusi pendidikan. Hal ini penting agar semua kegiatan pendidikan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya kendala ruang yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.

Bangunan fisik sekolah merupakan prasarana kunci berikutnya. Bangunan ini mencakup ruang-ruang utama seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, ruang guru, dan fasilitas pendukung lainnya. Setiap bangunan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rohiat, 2010). Keberadaan ruang kelas yang nyaman dan laboratorium yang lengkap sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Dengan demikian,

prasarana pendidikan yang baik akan menciptakan suasana belajar yang mendukung dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa.

2) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan. Sutjipto (2011) mengklasifikasikan sarana pendidikan ke dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah perabot (*furniture*) yang mencakup meja, kursi, lemari, papan tulis, dan peralatan sejenis yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kualitas dan kuantitas perabot harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan standar ergonomis yang berlaku. Perabot yang baik tidak hanya mendukung kenyamanan siswa, tetapi juga berkontribusi pada efektivitas proses pembelajaran.

Media pendidikan dan alat peraga juga menjadi komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran. Ini termasuk media visual, audio-visual, komputer, proyektor, dan berbagai alat peraga yang membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak dalam berbagai mata pelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan demikian, sarana pendidikan yang lengkap dan berkualitas akan sangat mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

3) Sarana Penunjang

Selain sarana utama, terdapat pula sarana penunjang yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung proses pendidikan. Fasilitas kesehatan seperti ruang UKS, toilet, dan area sanitasi lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Rusydi (2018) menekankan bahwa fasilitas kesehatan yang memadai dapat mencegah masalah kesehatan yang dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar.

Fasilitas keolahragaan dan ekstrakurikuler juga berperan penting dalam pengembangan bakat dan minat peserta didik di luar kegiatan akademik reguler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam konteks pendidikan modern mencakup komputer, jaringan internet, dan perangkat digital lainnya. Penggunaan teknologi ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber belajar, serta mendukung pembelajaran yang lebih interaktif.

Kesimpulannya, komponen sarana dan prasarana pendidikan merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terkait. Keberadaan dan pengelolaannya secara komprehensif akan sangat menentukan kualitas proses pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung

dengan efektif, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

d. Proses Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Menurut Barnawi dan Arifin (2012), proses manajemen sarana dan prasarana mencakup tahapan-tahapan strategis yang saling terkait dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, manajemen yang efektif terhadap sarana dan prasarana sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang setiap tahapan dalam manajemen ini menjadi krusial bagi para pengelola institusi pendidikan.

Beberapa ahli pendidikan, seperti Mulyasa (2013) dan Rusydi (2010), mengidentifikasi proses manajemen sarana dan prasarana melalui beberapa tahapan kunci yang saling berhubungan.

a) Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, penting untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan. Proses ini melibatkan identifikasi kondisi eksisting, proyeksi kebutuhan masa depan, dan *gap analysis* antara kondisi aktual dengan standar ideal yang ditetapkan. Direktorat Pembinaan SMA (2010) menekankan

bahwa analisis kebutuhan harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti jumlah peserta didik, kurikulum yang diberlakukan, standar nasional sarana dan prasarana, rencana pengembangan institusi, serta ketersediaan anggaran. Dengan melakukan analisis yang mendalam, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa semua kebutuhan fasilitas teridentifikasi dengan baik, sehingga dapat merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih tepat.

b) Proses Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap kritis dalam manajemen sarana dan prasarana. Sutjipto (2011) menjelaskan bahwa perencanaan yang efektif harus bersifat komprehensif, realistis, futuristik, dan berbasis data empiris. Dalam tahap ini, institusi pendidikan perlu melakukan identifikasi jenis dan spesifikasi sarana yang dibutuhkan, penentuan skala prioritas, estimasi biaya, mekanisme pengadaan, serta proyeksi jangka panjang. Perencanaan yang matang akan membantu institusi dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memastikan bahwa semua kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c) Pengadaan dan Inventarisasi

Proses pengadaan sarana dan prasarana harus memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Rohiat (2010) menggarisbawahi pentingnya prosedur pengadaan yang jelas, mekanisme seleksi penyedia barang, kesesuaian dengan standar mutu, serta dokumentasi resmi setiap pengadaan. Pengadaan yang dilakukan dengan baik akan memastikan bahwa semua sarana dan prasarana yang dibeli memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat digunakan secara optimal. Selain itu, inventarisasi merupakan bagian penting untuk mencatat dan mengidentifikasi seluruh aset yang dimiliki institusi pendidikan. Dengan melakukan inventarisasi secara rutin, institusi dapat memantau kondisi dan keberadaan sarana dan prasarana yang ada, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan.

d) Pemeliharaan dan Perawatan

Terdapat dua pendekatan utama dalam pemeliharaan: pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif mencakup kegiatan rutin untuk mencegah kerusakan, seperti pembersihan berkala, pengecekan kondisi, dan pemeliharaan berkala. Sementara itu, pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan, dengan tujuan mengembalikan fungsi sarana dan prasarana ke kondisi semula. Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat, institusi pendidikan dapat mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar dan memastikan bahwa semua fasilitas tetap berfungsi dengan baik.

e) Penghapusan

Proses ini dilakukan terhadap barang-barang yang sudah tidak layak pakai, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, menimbulkan biaya pemeliharaan yang lebih besar, atau tidak efisien. Penghapusan harus mengikuti prosedur administratif dan pertimbangan teknis yang ketat untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan melakukan penghapusan yang tepat, institusi pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa hanya sarana dan prasarana yang relevan dan bermanfaat yang tetap digunakan.

Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan siklus kompleks yang membutuhkan perencanaan matang, eksekusi sistematis, dan evaluasi berkelanjutan. Setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga penghapusan, saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas. Dengan manajemen yang efektif, institusi pendidikan tidak hanya dapat menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih baik, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pengelola sekolah, guru, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan manajemen

sarana dan prasarana pendidikan demi tercapainya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Mutu Pembelajaran

a. Definisi Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran merupakan konsep fundamental dalam dunia pendidikan yang memiliki kompleksitas tinggi dan multidimensional. Secara komprehensif, mutu pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang dicapai melalui serangkaian interaksi sistematis antara pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, dan lingkungan belajar Sagala, (2011). Konsep ini tidak sekadar merujuk pada hasil akhir pendidikan, melainkan mencakup seluruh aspek yang terlibat dalam proses transformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Menurut Depdiknas (2004), mutu pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu ukuran keberhasilan proses pendidikan yang mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan meliputi karakteristik peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta sumber daya lainnya. Proses pendidikan berkaitan dengan kualitas interaksi edukatif, metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan iklim akademik yang kondusif. Sementara output pendidikan merujuk pada prestasi belajar, kompetensi lulusan, dan dampak jangka panjang dari proses pendidikan tersebut.

Tilaar (2006) menekankan bahwa mutu pembelajaran bukan sekadar ukuran kuantitatif, melainkan konstruksi kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik. Ia mengartikan mutu pembelajaran sebagai proses sistematis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar melalui optimalisasi seluruh komponen pendidikan. Hal ini berarti mutu pembelajaran tidak dapat diukur dari satu dimensi tunggal, namun memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Perspektif Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dalam teori kualitas jasanya yang terkenal, mengidentifikasi bahwa mutu pembelajaran dapat dipahami melalui beberapa dimensi kunci. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- 1) *Tangibles* (bukti fisik): Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan representatif
- 2) *Reliability* (keandalan): Konsistensi dan kemampuan pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran
- 3) *Responsiveness* (daya tanggap): Kemampuan lembaga dan pendidik merespons kebutuhan peserta didik
- 4) *Assurance* (jaminan): Kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan pendidik
- 5) *Empathy* (empati): Perhatian individual terhadap peserta didik

Mutu pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi dinamis antara berbagai komponen pendidikan yang bertujuan

menghasilkan lulusan bermutu tinggi. Ini membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk senantiasa melakukan evaluasi, inovasi, dan perbaikan sistematis.

b. Indikator Mutu Pembelajaran

Indikator mutu pembelajaran merupakan parameter penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pendidikan secara komprehensif dan sistematis. Menurut Uno dan Lematenggo (2012), indikator mutu pembelajaran mencakup serangkaian kriteria yang menyeluruh, mulai dari aspek input, proses, hingga output pendidikan.

Gronlund dan Waugh (2009) mengidentifikasi indikator mutu pembelajaran melalui beberapa dimensi utama yang saling terintegrasi. Pertama, dimensi input pendidikan yang meliputi kualifikasi pendidik, kompetensi peserta didik, kelengkapan sarana prasarana, dan kesesuaian kurikulum. Indikator pada tahap input ini menjadi fondasi awal untuk menentukan potensi keberhasilan proses pembelajaran.

Dalam perspektif Bloom (1956) yang klasik namun masih relevan, indikator mutu pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah utama:

- 1) Ranah Kognitif (Pengetahuan)
 - a) Kemampuan memahami konsep
 - b) Tingkat penguasaan materi
 - c) Keterampilan berpikir kritis
 - d) Kemampuan analisis dan evaluasi

- 2) Ranah Afektif (Sikap)
 - a) Motivasi belajar
 - b) Sikap positif terhadap mata pelajaran
 - c) Etika dan nilai-nilai moral
 - d) Kepedulian sosial
- 3) Ranah Psikomotorik (Keterampilan)
 - a) Keterampilan praktis
 - b) Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan
 - c) Kreativitas dalam pemecahan masalah
 - d) Keterampilan teknis sesuai bidang studi

Sanjaya (2008) menambahkan bahwa indikator mutu pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari konteks proses belajar mengajar yang berkualitas. Beberapa indikator spesifik yang perlu diperhatikan meliputi:

- 1) Ketepatan strategi pembelajaran
- 2) Efektivitas metode mengajar
- 3) Kualitas interaksi edukatif
- 4) Tingkat partisipasi peserta didik
- 5) Kebermaknaan pengalaman belajar

Tilaar (2009) menekankan bahwa indikator mutu pembelajaran bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya, indikator tersebut tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif teknologis, Rosenberg (2001) mengungkapkan bahwa indikator mutu pembelajaran modern juga mencakup:

- 1) Kemampuan menggunakan teknologi informasi
- 2) Literasi digital
- 3) Adaptabilitas terhadap perubahan teknologi
- 4) Keterampilan kolaborasi virtual

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor dinamis dan saling berinterkoneksi. Menurut pandangan Slameto (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran dapat dipahami sebagai sistem ekosistem pendidikan yang rumit, di mana setiap komponen memiliki peran dan kontribusi uniknya sendiri dalam menciptakan pengalaman belajar berkualitas.

Faktor internal peserta didik menjadi salah satu determinan utama dalam proses pembelajaran. Munandar (2009) mengungkapkan bahwa motivasi belajar internal merupakan kekuatan fundamental yang mendorong peserta didik untuk mencapai prestasi akademik optimal. Motivasi ini tidak sekadar berkaitan dengan keinginan mendapatkan nilai tinggi, melainkan lebih pada proses transformasi pengetahuan dan pengembangan potensi diri. Kemampuan kognitif individual, yang mencakup tingkat kecerdasan, gaya belajar, dan kapasitas memproses

informasi, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proses pembelajaran.

Pendidik dalam konteks ini memainkan peran strategis sebagai agen perubahan dan fasilitator pengetahuan. Menurut Uno (2007), kompetensi profesional pendidik tidak sekadar diukur dari kemampuan mentransfer materi, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas. Keterampilan pedagogis, kreativitas dalam merancang strategi pengajaran, penguasaan materi mendalam, serta kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif menjadi faktor krusial dalam membangun mutu pembelajaran.

Lingkungan belajar eksternal memberikan konteks yang sama pentingnya dalam ekosistem pendidikan. Hamalik (2011) menekankan bahwa lingkungan fisik dan sosial memiliki pengaruh substantial terhadap proses transformasi pengetahuan. Sarana prasarana yang memadai, desain ruang kelas yang kondusif, serta ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran berkontribusi secara langsung terhadap kualitas pengalaman belajar peserta didik.

Interaksi sosial dalam lingkungan akademik turut memengaruhi dinamika mutu pembelajaran. Iklim akademik yang positif, karakteristik hubungan antarwarga sekolah, serta pola dukungan sosial akademik menjadi faktor penting yang membentuk pengalaman belajar peserta didik. Kualitas interaksi antara pendidik, peserta didik, dan komponen

sekolah lainnya menciptakan ruang dialogis yang mendorong pertumbuhan intelektual dan pengembangan potensi individual.

Faktor eksternal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah konteks sosial-kultural dan ekonomi. Latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, serta dukungan orangtua memiliki korelasi signifikan dengan motivasi dan prestasi belajar. Peserta didik yang mendapatkan dukungan komprehensif dari lingkungan sekitarnya cenderung memiliki performa akademik lebih baik dibandingkan mereka yang menghadapi keterbatasan.

Teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini juga menjadi faktor yang semakin berpengaruh dalam mutu pembelajaran. Kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, literasi digital, serta keterampilan memanfaatkan sumber belajar digital menjadi kompetensi baru yang menentukan kualitas proses pendidikan.

d. Hubungan antara Sarana Prasarana dan Mutu Pembelajaran

Sarana prasarana pendidikan merupakan komponen instrumental yang memiliki korelasi signifikan dengan mutu pembelajaran. Ibrahim (2009) mengungkapkan bahwa infrastruktur pendidikan tidak sekadar menjadi elemen pendukung, melainkan merupakan ekosistem yang secara integral memengaruhi kualitas proses belajar mengajar.

Ketersediaan sarana prasarana yang memadai memberikan kontribusi substantif terhadap efektivitas pembelajaran. Menurut

Suryosubroto (2010), ruang kelas yang representatif, kelengkapan media pembelajaran, serta aksesibilitas sumber belajar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses transfer pengetahuan. Ruang kelas yang nyaman, pencahayaan yang optimal, serta tata letak yang ergonomis terbukti secara signifikan memengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar peserta didik.

Perpustakaan sebagai jantung sumber pengetahuan memiliki peran strategis dalam mendukung mutu pembelajaran. Koleksi buku yang komprehensif, akses digital, serta ruang baca yang representatif mendorong peserta didik untuk mengembangkan budaya literasi dan penelitian. Sarana penelusuran informasi yang modern, seperti katalog digital dan akses internet, semakin memperluas cakrawala pengetahuan di luar batasan ruang kelas konvensional.

Laboratorium dan sarana praktikum menjadi wahana krusial dalam mengkonversi pengetahuan teoritis menjadi kompetensi praktis. Fasilitas yang lengkap dan mutakhir memungkinkan peserta didik untuk melakukan eksperimen, pengamatan, dan verifikasi konsep-konsep akademik. Menurut Mulyasa (2007), kualitas infrastruktur laboratorium berbanding lurus dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sains dan penelitian.

Media teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian integral dari sarana prasarana pendidikan. Ketersediaan komputer, jaringan internet, proyektor, dan perangkat digital lainnya

tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan menjadi medium esensial dalam proses pembelajaran kontemporer. Akses teknologi yang memadai mendorong pengembangan model pembelajaran inovatif seperti *blended learning* dan *e-learning*.

Aspek ergonomis sarana prasarana juga memiliki kontribusi yang signifikan. Desain ruang belajar yang memperhatikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik berkorelasi positif dengan performa akademik. Kursi dan meja yang ergonomis, sirkulasi udara yang baik, serta pencahayaan yang memenuhi standar kesehatan dapat meningkatkan fokus dan produktivitas belajar.

Mutu sarana prasarana tidak sekadar diukur dari kuantitas, melainkan juga kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan kurikulum. Prasarana yang terintegrasi dengan metodologi pengajaran mutakhir akan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karenanya, investasi berkelanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana menjadi strategi fundamental dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di madrasah tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang menjadi landasan filosofis dan operasional pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar norma abstrak, melainkan prinsip-prinsip yang secara konkret memengaruhi arah kebijakan, pola pengambilan keputusan, serta budaya pengelolaan sarana

prasarana di madrasah. Dalam konteks penelitian ini, terdapat enam dimensi sistem nilai yang menjadi landasan normatif sekaligus orientasi praktis dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor, meliputi dimensi teologis, filosofis, yuridis, akademis, empiris, dan etis (Nata, 2016).

1. Nilai Teologis

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam perspektif Islam dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap fasilitas pendidikan merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Konsep khalifah dalam Islam menempatkan manusia sebagai pengemban amanah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada secara optimal. Al-Quran secara eksplisit mendorong umat manusia untuk senantiasa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan setiap diri untuk memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk masa depan. Dengan demikian, manajemen sarana prasarana bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan etis yang mendalam (Nashir, 2013).

2. Nilai Filosofis

Secara filosofis, sarana dan prasarana pendidikan dipahami bukan sekadar instrumen fisik, melainkan sebagai medium transformasi pengetahuan dan pembentukan karakter peserta didik. Pendekatan filosofis ini memandang setiap fasilitas pendidikan memiliki potensi untuk

menciptakan ruang dialogis antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan belajar yang mendorong proses konstruksi pengetahuan secara aktif dan kritis. Filosofi pengelolaan sarana prasarana modern mensyaratkan transformasi paradigmatis dari pendekatan konvensional yang mekanistik menuju pendekatan organis yang lebih fleksibel dan adaptif, sehingga manajemen sarana prasarana dipahami sebagai proses dinamis yang berkelanjutan dan bermakna dalam menciptakan ekosistem belajar yang optimal (Daulay, 2014).

3. Nilai Yuridis

Penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di madrasah memiliki landasan yuridis yang kuat dan mengikat. Nilai yuridis ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sarana prasarana harus selaras dengan regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Kepatuhan terhadap landasan yuridis ini sekaligus menjadi tolok ukur akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas pendidikan di MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).

4. Nilai Akademis

Dari perspektif akademis, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dipahami sebagai kajian ilmiah yang memiliki kerangka

konseptual, metodologis, dan empiris yang kuat. Nilai akademis ini mendorong pengelolaan sarana prasarana yang tidak hanya didasarkan pada intuisi atau kebiasaan, melainkan pada hasil penelitian, teori-teori manajemen pendidikan yang telah teruji, serta praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan akademis dalam manajemen sarana prasarana mengharuskan adanya dokumentasi yang sistematis, analisis berbasis data, serta evaluasi yang terukur terhadap setiap aspek pengelolaan fasilitas pendidikan (Fattah, 2004).

5. Nilai Empiris

Nilai empiris dalam manajemen sarana dan prasarana mengacu pada pentingnya data dan pengalaman nyata di lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan. Pengelolaan sarana prasarana yang baik harus berangkat dari kondisi aktual yang ditemukan di lapangan, bukan sekadar asumsi teoritis. Observasi langsung terhadap kondisi fasilitas, pemanfaatan sarana dalam proses pembelajaran, serta respons peserta didik dan pendidik terhadap ketersediaan infrastruktur menjadi sumber data empiris yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan pengembangan sarana prasarana yang tepat sasaran (Barnawi & Arifin, 2012).

6. Nilai Etis

Dimensi etis dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan fasilitas. Para pemikir pendidikan Islam menekankan bahwa konsep manajemen dalam Islam dilandasi oleh prinsip-

prinsip etis yang meliputi kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan (Bashori, 2016). Dalam konteks sarana prasarana pendidikan, nilai etis direfleksikan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, pengadaan yang bebas dari praktik korupsi, pemeliharaan yang konsisten, serta pemanfaatan fasilitas yang adil dan merata bagi seluruh warga madrasah (Muhaimin, 2012).

C. Landasan Kebijakan

Penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berpijak pada sejumlah regulasi dan kebijakan yang secara hierarkis mengatur standar, mekanisme, dan tanggung jawab pengelolaan fasilitas pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kerangka normatif yang mengikat setiap satuan pendidikan, termasuk madrasah aliyah negeri, dalam mengelola sarana prasarana secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Kepatuhan terhadap landasan kebijakan ini sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas manajemen sarana prasarana di MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor (Depdiknas, 2004).

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai sarana dan prasarana. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap satuan

pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi madrasah untuk menjamin ketersediaan dan kualitas fasilitas yang mendukung proses pembelajaran yang bermutu (Arikunto & Yuliana, 2009).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur secara rinci standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Regulasi ini menetapkan kriteria minimum mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Bagi madrasah aliyah negeri seperti MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor, pemenuhan standar dalam peraturan ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 merupakan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan pendidikan madrasah, termasuk ketentuan mengenai sarana dan prasarana yang harus tersedia di

lingkungan madrasah. Regulasi ini memberikan pedoman teknis yang spesifik bagi madrasah aliyah dalam mengelola infrastruktur pendidikan, mulai dari standar bangunan, peralatan pembelajaran, media pendidikan, buku dan sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, hingga perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan bermutu. Sebagai institusi di bawah naungan Kementerian Agama, MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor wajib menjadikan PMA Nomor 90 Tahun 2013 ini sebagai acuan normatif dalam seluruh proses manajemen sarana prasarana pendidikan (Direktorat Pembinaan SMA, 2010).

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran, sebagai landasan komparatif dan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus / Tujuan	Hasil / Temuan	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Harun & Usman (2019), <i>Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah</i> , 7(1).	Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri Lamteubee Aceh Besar	Mengkaji pengelolaan sarana prasarana mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar.	Manajemen sarana prasarana yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran; perencanaan yang matang menjadi kunci	Persamaan: fokus pada manajemen sarana prasarana dan mutu pembelajaran. Perbedaan: penelitian ini dilakukan di madrasah aliyah (MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor), bukan sekolah dasar, dan

				utama keberhasilan pengelolaan.	menambahkan aspek pengorganisasian serta faktor pendukung-penghambat.
2	Karlina, Muliadi, & Sudarto (2021), <i>Jurnal Pendidikan dan pembelajaran Sekolah Dasar</i> .	Analisis Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone	Menganalisis peran serta komite sekolah dalam mendukung pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif.	Keterlibatan aktif komite sekolah terbukti meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana; partisipasi pemangku kepentingan eksternal menjadi faktor pendukung penting.	Persamaan: mengkaji pengelolaan sarana prasarana dan peran stakeholder. Perbedaan: penelitian ini menelaah manajemen secara menyeluruh (bukan hanya peran komite) dan berfokus pada konteks madrasah aliyah negeri.
3	Widodo & Kurniawan (2023), <i>Jurnal Pendidikan dan Teknologi</i> , 12(3), 201-215.	Transformasi Digital dalam Perencanaan Sarana Prasarana Madrasah	Mengeksplorasi penerapan teknologi digital dalam proses perencanaan sarana prasarana di madrasah guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan.	Transformasi digital dalam perencanaan sarana prasarana meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan; madrasah yang memanfaatkan sistem digital memiliki pengelolaan lebih terstruktur.	Persamaan: konteks madrasah dan fokus pada perencanaan sarana prasarana. Perbedaan: penelitian ini mencakup seluruh siklus manajemen (bukan hanya perencanaan digital) dan mengkaji dampaknya terhadap mutu pembelajaran secara langsung.
4	Nugroho & Sari (2023), <i>Jurnal Manajemen Pendidikan</i> , 15(2), 112-128.	Aksesibilitas dan Inklusi dalam Infrastruktur Pendidikan	Meneliti sejauh mana infrastruktur pendidikan telah memenuhi standar aksesibilitas dan	Infrastruktur yang aksesibel dan inklusif meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar peserta	Persamaan: membahas infrastruktur pendidikan dan kualitas pembelajaran. Perbedaan:

			inklusivitas bagi seluruh peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus.	didik; masih terdapat kesenjangan signifikan antara standar ideal dan kondisi nyata di lapangan.	penelitian ini lebih berfokus pada manajemen operasional sarana prasarana di MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor secara menyeluruh, bukan hanya aspek aksesibilitas.
5	Rochman (2022), <i>Jurnal Administrasi Pendidikan</i> , 19(1), 45-62.	Partisipasi Stakeholder dalam Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan	Mengkaji model partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menghasilkan rencana yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.	Partisipasi multipihak menghasilkan perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata; keterlibatan guru dan orang tua meningkatkan relevansi dan akuntabilitas program.	Persamaan: mengkaji perencanaan sarana prasarana dan peran stakeholder dalam pendidikan. Perbedaan: penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor dan mengaitkan manajemen sarana prasarana secara langsung dengan mutu pembelajaran.
6	Sutrisno & Handayani (2023), <i>Yogyakarta: Pustaka Pelajar</i>	Manajemen Strategis Infrastruktur Pendidikan	Menelaah penerapan manajemen strategis dalam pengembangan infrastruktur pendidikan jangka panjang, termasuk analisis SWOT dan penyusunan master plan sarana prasarana.	Pendekatan manajemen strategis terbukti menghasilkan pengelolaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan adaptif; lembaga dengan master plan yang jelas memiliki tingkat efisiensi penggunaan	Persamaan: membahas manajemen infrastruktur/sarana prasarana pendidikan secara strategis. Perbedaan: penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan naturalistik dan berfokus pada konteks spesifik

				anggaran yang lebih baik.	madrasah aliyah negeri.
7	Nurstalis, Nusi, Tatang Ibrahim, & Nandang Abdurrohman (2021), <i>Jurnal Isema: Islamic Educational Management</i> , 6(1), 63–76.	Peran Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Islam Cendekia Cianjur	Menganalisis peran pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam swasta.	Manajemen sarana prasarana yang terstruktur terbukti meningkatkan mutu pembelajaran secara signifikan; peran aktif kepala sekolah dan koordinasi lintas unit menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan.	Persamaan: Mengkaji peran manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga pendidikan Islam dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada madrasah aliyah negeri (MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor) dengan cakupan manajemen yang lebih komprehensif meliputi aspek pengorganisasian dan analisis faktor pendukung-penghambat.
8	Ginanjari, M. H., Jundullah, M., & Rahman (2023), <i>Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam</i> , 6(01), 103–118.	Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran di SMA Al-Minhaj Bogor	Mendeskripsikan implementasi manajemen sarana prasarana dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah menengah atas berbasis Islam di wilayah Bogor.	Pengelolaan sarana prasarana yang sistematis dan berbasis kebutuhan nyata berdampak positif terhadap kualitas proses pembelajaran; keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang	Persamaan: Berfokus pada manajemen sarana prasarana di lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas di wilayah Bogor, dengan kajian dampaknya terhadap mutu pembelajaran. Perbedaan: Penelitian ini mengkaji dua madrasah aliyah negeri (bukan swasta) secara komparatif, dengan

				memerlukan strategi penggalangan sumber dana alternatif.	pendekatan naturalistik yang lebih mendalam pada dinamika konteks madrasah negeri.
9	Neliwati, Harmuliani, N., Rubino, & Siregar, A. (2023), <i>Jurnal Dirosah Islamiyah</i> , 5(2), 401–410.	Pola Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Negeri 1 Hamparan Perak	Mengidentifikasi pola dan model pengelolaan sarana prasarana yang diterapkan di sekolah menengah pertama negeri guna meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.	Pola manajemen sarana prasarana yang terencana dan berbasis evaluasi periodik mampu meningkatkan mutu pembelajaran; koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pengelolaan.	Persamaan: Membahas pola manajemen sarana prasarana di sekolah negeri dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan: Penelitian ini dilakukan pada jenjang madrasah aliyah negeri dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda (di bawah Kemenag), serta menambahkan dimensi pengorganisasian dan faktor pendukung-penghambat yang lebih komprehensif.
10	Tajimudin, M., Sanusi, A., & Sudarsyah, A. (2020), <i>Nusantara Education Review (NER)</i> , 3(2).	Manajemen Sarana Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah dan	Membandingkan penerapan manajemen sarana prasarana antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) negeri di Kota Bandung dalam	Terdapat perbedaan signifikan antara pola manajemen sarana prasarana MI dan SD; MI cenderung menghadapi	Persamaan: Mengkaji manajemen sarana prasarana dalam konteks madrasah negeri dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran,

		Sekolah Dasar di Kota Bandung	upaya meningkatkan mutu pembelajaran, mencakup aspek perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi.	keterbatasan anggaran yang lebih besar namun mampu memanfaatkan partisipasi komunitas sebagai sumber daya alternatif; keduanya menunjukkan hubungan positif antara kualitas manajemen sarana prasarana dan mutu pembelajaran.	menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Penelitian ini berfokus khusus pada jenjang madrasah aliyah negeri di Kota Bogor (bukan jenjang dasar), dengan kajian yang lebih mendalam pada aspek pengorganisasian, faktor pendukung-penghambat, serta pendekatan naturalistik studi kasus.
--	--	-------------------------------	--	---	--

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi posisi penelitian ini secara ilmiah. Penelitian ini memiliki kesamaan tema besar dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu manajemen sarana prasarana dalam konteks pendidikan. Namun, kebaruannya terletak pada fokus yang lebih spesifik di lingkungan madrasah aliyah negeri (MAN 1 Bogor dan MAN 3 Bogor), cakupan manajemen yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga analisis faktor pendukung dan penghambat, serta penggunaan pendekatan kualitatif naturalistik yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika kontekstual yang unik pada lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas.